



ANALISIS PROGRAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 JAKARTA SELATAN

Yusuf Krisman Gea^{1*)}, Santoso Tri Raharjo², Gigin Ginanjar Kamil Basar³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

yusuf21005@mail.unpad.ac.id

santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

gigin@unpad.ac.id

ABSTRAK

Lanjut usia yang mengalami keterlantaran sekarang ini masih banyak ditemukan baik karena ditelantarkan oleh keluarga maupun karena hidup sebatang karang dan tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka menangani kesulitan lansia terlantar, pemerintah membuat kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia yang kemudian dilanjutkan ke dalam tahap program yang disebut program pelayanan sosial. Salah satu program pelayanan sosial yang bagi lansia adalah program pelayanan sosial berbasis panti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis program pelayanan sosial lanjut usia di panti sosial tresna werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan dengan menggunakan metode analisis kebijakan Chambers. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Untuk menentukan sumber informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang kemudian terdiri dari pengurus panti, pekerja sosial dan warga binaan lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan sosial lansia berbasis panti memberikan manfaat yang baik kepada lanjut usia terlantar. Dengan adanya program pelayanan sosial berbasis panti tersebut dapat memberikan tempat tinggal yang aman bagi lansia terlantar, mencukupi kebutuhan dasar lansia, serta memberikan pembinaan-pembinaan yang membangun lansia dan membantu lansia untuk dapat menghabiskan masa tua-nya dengan baik dan produktif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan sosial yang dilakukan kurang maksimal.

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Panti Werdha, Lanjut Usia.

ABSTRACT

There are still many elderly people who are currently neglected either because they were abandoned by their families or because they live on a rock and are unable to make ends meet. In order to overcome the problem of neglected elderly, the government made a social welfare policy for the elderly which was then continued into the program stage called the social service program. One of the social service programs for the elderly is an orphanage-based social service program. This study aims to analyze the social service program for the elderly at the Tresna Werdha Budi Mulia 3 Social Institution, South Jakarta, using the Chambers policy analysis method. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques used are literature studies, interviews and observations. Determination of informants in this study was carried out using purposive sampling consisting of orphanage administrators, social workers and elderly assisted residents. The results showed that the orphanage-based social service program provided good benefits to neglected elderly people. With this orphanage-based social service program, it can provide a safe place to live for neglected elderly, meet the basic needs of the elderly, and provide guidance that builds the elderly and helps the elderly to be able to spend their old age well and productively. However, in practice there are still several obstacles that cause social services to be carried out less than optimally.

Keywords: Social Services, Nursing Home, Elderly.



PENDAHULUAN

Dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk saat ini, penduduk lanjut usia semakin mengalami peningkatan dan pertumbuhan populasi (Sahin, et.al., 2018). Di Indonesia ada 30,16 juta lansia pada tahun 2021, atau 11,01 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk lanjut usia saat ini didukung dengan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang memberikan pengaruh pada peningkatan umur harapan hidup (Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021). Derajat kesehatan serta keberhasilan meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan bagian salah satu sisi dari upaya pemerintah yang berhasil, namun disisi lain dengan meningkatnya usia harapan hidup seseorang memungkinkan terjadinya masalah yang akan dihadapinya (Rammohan & Magnani, 2012). Istilah lanjut usia sering didefinisikan dari kategori jumlah usia seseorang. Karena itu, ada beberapa pandangan batasan usia yang berbeda dalam mendefinisikan lanjut usia. Dalam Permensos Nomor 19/2012 menyatakan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Begitu juga, *World Health Organization* (2016) mengungkapkan lanjut usia adalah seseorang yang memiliki rentang usia 60-75 tahun. Sementara itu, Hawari (1997) mendefinisikan lansia sebagai mereka yang telah hidup lebih dari 65 tahun. Setyonegoro dalam Nirmala (2013) mendukung definisi lanjut usia yang menyatakan bahwa seseorang dianggap lanjut usia jika telah berusia lebih dari 65 atau 70 tahun. Dari beberapa pandangan tersebut, istilah "lansia", mungkin dapat didefinisikan sebagai individu yang sudah berusia 60 tahun.

Meningkatnya jumlah populasi lansia, akan menyebabkan kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok ini akan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya perubahan dalam gaya hidup, kesehatan, fisik, psikososial dan peran sosial yang dimiliki oleh lanjut usia (Rahmayani, et.al., 2016; Saputri & Prasetyo, 2012). Demikian juga, Kusumawardani & Andanawarih (2018) menyebutkan bahwa perubahan dalam diri lanjut usia meliputi perubahan psikologi, perubahan fisiologi, dan perubahan sosial serta mengalami penurunan kemampuan tubuh. Dengan demikian, maka perubahan tersebut akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan di dalam diri mereka. Lansia akan mengalami penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik seiring bertambahnya usia yang dapat menurunkan kualitas hidupnya (Ariyanto, et al., 2020). Demikian pula, Osman et.al (2012) menyampaikan bahwa semakin tua individu akan mengalami proses perubahan dari segi fisik, mental, sosial dan kesejahteraan yang menyebabkan banyak kecenderungan lansia menjadi kesepian, kecewa dan kehilangan keberanian untuk percaya diri. Disamping itu, penduduk lansia juga merupakan kelompok yang rentan mengalami masalah relasi dengan lingkungan sosialnya (Sulastri dan Humaedi, 2017). Banyak lansia yang menarik diri dan membatasi diri untuk bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Begitu juga, hubungannya dengan keluarga bermasalah karena kebanyakan keluarga dari lansia sangat sibuk dan akibatnya waktu bagi lansia untuk diperhatikan sangatlah sedikit. Hal ini menyebabkan banyaknya lanjut usia yang mengalami keterlantaran.

Merespon kondisi lanjut usia tersebut, pemerintah sudah mengupayakan dan memperhatikan kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia melalui kebijakan-kebijakan, peraturan tertulis, dan program-program pelayanan yang diselenggarakan untuk membantu mengatasi masalah lansia serta memenuhi kebutuhan mereka. Undang-Undang No.13/1998 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperhatikan kelompok lanjut usia yang memfokuskan pada tujuan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial lansia, hak-hak lanjut usia serta tugas dan tanggung jawab para berbagai pihak yakni pemerintah, masyarakat/swasta, dan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka Kementerian Sosial dalam hal ini membuat suatu regulasi tentang Permensos No.19/2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan menjadi program-program untuk kesejahteraan sosial lansia. Di dalam permensos nomor 19/2012, menyampaikan bahwa pelayanan



sosial bagi lanjut usia dapat dilaksanakan dalam panti maupun di luar panti serta berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut. Pelayanan sosial lanjut usia dilakukan berdasarkan landasan hak-hak asasi manusia yang berarti bahwa dalam pemberian pelayanan tersebut tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh lansia sebagai warga negara dan seorang individu manusia. Dengan demikian, pada pelaksanaannya pelayanan sosial lansia dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang mana prinsip tersebut adalah nilai-nilai dasar yang mampu mencapai pelayanan terbaik (Rusmiyati, 2020).

Program pelayanan sosial merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada lansia agar dapat memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya (Permensos No.19 tahun 2012). Berdasarkan pengertian tersebut maka program pelayanan sosial memiliki peran sebagai tindakan yang membantu lansia menjadi pulih dari setiap masalah yang dihadapi, terpenuhinya kebutuhan, dan berfungsi sosial kembali. Hal ini juga didukung oleh Kodaruddin, et.al (2020) bahwa tujuan pelayanan sosial yang dilaksanakan di panti asuhan adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia, membantu lansia untuk hidup sejahtera di masa tuanya, melakukan kegiatan aktif, serta mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi lansia. Begitu pula, Suharto dalam Maryatun, Raharjo & Taftazani (2022) mengemukakan bahwa pelayanan sosial memiliki arti sebagai upaya untuk menolong individu ataupun kelompok yang menghadapi masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga, pelayanan sosial yang diberikan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan lansia dan memenuhi kebutuhan lansia. Program pelayanan sosial lansia dalam panti merupakan pelayanan yang diselenggarakan melalui lembaga kesejahteraan sosial dengan sistem asrama. Lembaga kesejahteraan Sosial merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan sosial. Organisasi pelayanan sosial merupakan suatu organisasi yang selalu melaksanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan berupa pelayanan kepada masyarakat maupun kelompok tertentu agar mampu mencapai kesejahteraan sosial (Sukmana, Nulhaqim & Apsari, 2023). Hal tersebut didukung oleh Nurwahyuliningsih, Nulhaqim & Rachim (2022) yang menyatakan bahwa organisasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada manusia adalah organisasi yang membantu masyarakat untuk dapat mencapai kebutuhan hidupnya dan agar kondisi kesejahteraannya semakin meningkat. Oleh karena itu, mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebutuhan dasar lansia yang baik merupakan tujuan dari pelayanan sosial tersebut. Sehingga, program pelayanan sosial lansia dalam panti memiliki jenis pelayanan yakni, pelayanan fisik, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan mental dan agama, serta pelayanan pemakaman.

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Panti Budi Mulia 3 Margaguna memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial lansia dapat terpenuhi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang baik. Jumlah lansia yang tinggal di panti berjumlah 350. Adapun program layanan di PSTW Budi Mulia 3 meliputi pelayanan pembinaan fisik, pembinaan psikologis, bimbingan kerohanian, serta pembinaan sosial. Tujuan program tersebut adalah untuk membantu lanjut usia menikmati hari-hari tuanya dengan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Melalui uraian yang sudah dipaparkan diatas, adanya ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengkaji tentang analisis program pelayanan sosial lansia di panti sosial tresna werdha Budi Mulia 3 dengan menggunakan metode analisis Chambers. Analisa dengan menggunakan metode Chambers dapat membantu untuk menganalisis kebijakan sosial ataupun program sosial yang tujuannya adalah untuk membantu dan mempercepat penganalisa kebijakan dalam memahami setiap elemen dasar minimum yang terlibat dalam suatu program atau kebijakan (Chambers & Bonk, 2013). Adapun

elemen-elemen yang dikemukakan oleh Chambers & Bonk (2013) sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan atau program yakni sebagai berikut:

Goals and Objectives (Tujuan dan Sasaran)

Tujuan adalah langkah awal untuk memahami ekspektasi dari suatu program, dari tujuan itu menggambarkan sasaran dan bagaimana pelaksanaan program. Tipe tujuan dapat diidentifikasi melalui tujuan jangka pendek/Panjang, tujuan (*abstrak*) dan sasaran (spesifik kelompok sasaran dan standar kinerja). Kriteria evaluasi dari tujuan: (1) kejelasan, Tujuan dan sasaran dapat menjadi jelas hanya jika ketentuan dengan di dalamnya didefinisikan dengan baik. (2) Keturukuran, Keterukuran disini dimaksudkan pada hanya pada tujuan, bukan sasaran, yang menerapkan kriteria keterukuran melalui durasi (3) manipubilitas, Beberapa tujuan menyangkut faktor-faktor yang tidak dapat diubah dengan cara apa pun yang dapat dibayangkan (secara harfiah tidak dapat dimanipulasi). (4) Perhatian dengan tujuan yang merupakan hasil, bukan hanya "input" atau layanan yang diberikan,

Forms of Benefits and Services (Bentuk Manfaat dan Layanan)

Manfaat atau layanan program merupakan sesuatu yang ditransfer (*trade off*) dari pelaksana program ke penerima program. Tipe manfaat/Jenis layanan mencakup layanan profesional, manfaat langsung, diskriminasi positif, asuransi, subsidi (tidak membayar penuh), garansi pemerintah, regulasi perlindungan (dalam bentuk UU), pemanfaatan kekuasaan/*power over decision* (dorongan dari pemerintah untuk kelompok tertentu agar bisa mengambil keputusan secara mandiri). Kriteria evaluasi dari manfaat dan layanan: (1) *stigmatisasi, efisiensi, cost-efektivebess, substutability, consumer sovereignty, trade-offs, korsiveness/intrusiveness*, kompleksitas dan birokrasi administrasi, serta adaptabilitas pengguna.

Eligibility Rules (Aturan Kelayakan)

Aturan/standar kelayakan merupakan bagian yang paling penting di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Standar kelayakan bertujuan untuk memberikan batasan-batasan serta kategori-kategori tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan program atau kebijakan tersebut. Aturan kelayakan bertujuan untuk membagi kelompok menjadi dua yakni kelompok yang layak menerima layanan atau program dan kelompok yang tidak layak menerima layanan atau program. Aturan kelayakan atau standar kelayakan ada karena suatu program tidak ditujukan kepada seluruh atau semua penduduk. Hal ini dikarenakan setiap kelompok penduduk memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. oleh karena itu, supaya setiap kelompok mendapatkan layanan sesuai kebutuhan-kebutuhannya maka sangat diperlukan aturan kelayakan.

Administration and Service Delivery (Administrasi dan Pengiriman Layanan)

Mekanisme pemberian layanan dapat diidentifikasi melalui teori program, desain program serta spesifikasi program. Tipe sistem penberian layananL sentralisasi, federasi, manajemen kasus, Lembaga rujukan, memperkerjakan pekerja yang juga penyintas, Lembaga yang berorintasi pada keragaman, Lembaga yang dikelola warga. Kriteria evaluasi: (1) mengarah pada: kepemilikan desain program/kebijakan, keberlanjutan, aksesibilitas, pertanggungjawaban, pemberdayaan klien, partisipasi klien dalam membuat keputusan, serta penyesuaian terhadap keragaman etnis.

Financing (Pembiayaan)

Pendanaan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu program sosial. Berikut enam tipe sumber pendanaan suatu program: *Prepayments and the insurance principle, Publicly regulated*

private contracts, Voluntary contributions, Tax Revenue Appropriation, Fee for Service, and Private Endowment. Kriteria evaluasi: 1) mengarah pada keberlanjutan pendanaan, stabilitas dalam perubahan ekonomi: inflasi atau perubahan demografi, korupsi, *finansial risk, Perverse Incentives.* 2) Implikasi layanan terhadap kesetaraan dan efisiensi. 3) Kesesuaian layanan dengan analisis masalah sosial.

Interactions (Interaksi)

Elemen interaksi menunjukkan adanya hubungan antara suatu kebijakan/program dengan program-program yang lainnya. Hal ini akan terjadi ketika program tersebut saling memberikan efek antara satu dengan yang lain.

Elemen-elemen di atas sangatlah membantu penganalisa kebijakan atau program untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari program yang dianalisa seperti gambaran apa tujuan dan sasaran dari program, mengidentifikasi bentuk layanan atau manfaat yang diberikan kepada penerima program, memahami sejauhmana eligibilitas dari program mulai dari hak-hak apa saja yang terpenuhi dari adanya program tersebut, mengidentifikasi struktur administrasi atau organisasi untuk pemberian layanan, mengidentifikasi metode pembiayaan dalam program yakni apakah pembayaran di muka dengan prinsip asuransi, kontrak pribadi yang diatur secara publik, sumbangan sukarela, alokasi penerimaan pajak, biaya tambahan untuk memperoleh layanan, dan wakaf pribadi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi apakah program tersebut memiliki interaksi atau hubungan yang saling membantu dengan program yang lain.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) menyampaikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik dalam menentukan subjek informan dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. Soehartono (2011) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah cara yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel atau subjek penelitian sesuai dengan pertimbangan kebutuhan peneliti. Sehingga, penggunaan teknik *purposive sampling* ditujukan untuk memilih informan yang bisa membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Adapun teknik perolehan data yang digunakan oleh peneliti meliputi 1) Studi literatur, yakni peneliti mengumpulkan data-data melalui pengkajian literature yang terdahulu melalui sumber-sumber seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan tulisan-tulisan lainnya yang ditelusuri menggunakan database *google scholar, scopus,* dan lainnya. 2) Studi lapangan, yakni peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pengurus panti, pekerja sosial dan warga binaan sosial lansia di PSTW Budi Mulia 3.

Untuk menganalisis program pelayanan sosial lansia dalam panti, maka peneliti menggunakan metode analisis Chambers. Menurut Chambers dan Bonk (2013:35-36) terdapat 6 (enam) elemen dalam menganalisis kebijakan atau program. Adapun elemen-elemen tersebut meliputi:

- 1) Goals and Objectives (Tujuan dan Sasaran)
- 2) Forms of benefits and services (Bentuk manfaat dan layanan)
- 3) Eligibility rules (Aturan Kelayakan)
- 4) Administration and service delivery (Administrasi dan pengiriman layanan)
- 5) Financing (Pembiayaan)



6) Interactions (Interaksi)

Keenam elemen tersebut mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dan menganalisis setiap kelebihan dan kekurangan dari suatu program atau kebijakan. Sehingga, Metode Chambers dapat menjadi alat untuk menjelaskan dan menganalisa terkait kebijakan yang mau dianalisis untuk memahami isi dari program atau kebijakan yang ada.

PEMBAHASAN

Berikut ini deskripsi analisis program pelayanan sosial lansia berbasis panti menggunakan metode chambers berdasarkan elemen-elemen yang dikemukakan oleh Chamber dan Bonk:

Tujuan dan Sasaran (*Goals and Objectives*)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, tujuan dari program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti werdha Budi Mulia 3 adalah untuk membantu lansia terlantar agar kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan fisik/jasmani, kerohanian, serta sosial dan psikologis dapat tercukupi dengan baik dan layak sehingga para warga binaan sosial yakni lansia di panti Budi Mulia 3 bisa menikmati hari-hari tua-nya. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan pelayanan yang diatur oleh Permensos Nomor 19 tahun 2012 bahwa pelayanan sosial ada untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dari para lanjut usia. Kebutuhan dasar lansia merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia itu sendiri (Triwanti, Ishartono & Gutama, 2014). Menurutny, pemenuhan kebutuhan yang diberikan dan dilaksanakan oleh panti merupakan bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia. Sehingga, melalui pelayanan sosial yang diberikan oleh panti akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lansia baik secara kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial serta kebutuhan spiritualnya yang kemudian nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Berkaitan dengan tujuan dari program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti, maka untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan lansia. Adapun kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh panti untuk mencapai tujuan program pelayanan sosial lansia meliputi:

- 1) Pembinaan fisik, yakni kegiatan yang membantu pemenuhan kebutuhan fisik lansia yang meliputi pemberian makan 3 (tiga) kali dalam sehari yang ditentukan setiap pagi jam 07.30, siang jam 11.30 dan sore 16.30 ditambah dengan snack dan buah-buahan ringan pada pagi dan sore hari. Pemberian layanan kesehatan dan pemberian kegiatan senam untuk menjaga kondisi fisik lansia tetap sehat dan bugar.
- 2) Pembinaan Mental dan Kerohanian, yakni kegiatan yang memiliki fokus untuk mencukupi kebutuhan lansia dari segi psikologis dan spiritualnya agar mereka dapat menghadapi setiap permasalahan psikis di dalam hidupnya serta meningkatkan hubungannya dengan Tuhannya.
- 3) Pembinaan Sosial, yakni kegiatan yang bertujuan untuk membina hubungan sosial antar penerima layanan serta selalu menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya melalui ikut serta dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam panti (Sulistyo, 2008; Departemen Sosial RI, 2005).

Sasaran dari program pelayanan sosial lansia berbasis panti tentunya adalah lanjut usia itu sendiri. Akan tetapi pelayanan sosial yang berbasis panti tidak menerima semua lanjut usia untuk masuk di panti, melainkan lanjut yang mengalami keterlantaran.

Bentuk Manfaat dan Layanan yang Diterima (*Forms of Benefits and Services*)

Program pelayanan sosial berbasis panti sangatlah memberikan manfaat yang sangat baik kepada penerima manfaat dari program tersebut. Adapun bentuk manfaat dari program pelayanan



sosial berbasis panti di PSTW Budi Mulia 3 yang didapatkan oleh penerima layanan adalah barang atau komoditas material. Bentuk manfaat dari barang dan komoditas material yang didapatkan melalui program pelayanan sosial bagi lansia terlantar adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah. Bagi lanjut usia terlantar, mendapatkan makanan yang rutin, pakaian untuk menghangatkan badan, tempat tinggal yang layak serta perlengkapan lainnya merupakan hal yang sangat sulit untuk mereka dapatkan apabila tinggal di luar dan tidak menerima program pelayanan sosial berbasis panti. Untuk menerima layanan tersebut, maka penyelenggara mengharuskan lansia tinggal di dalam panti. Oleh karena itu, penyaluran manfaat barang dan komoditas tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Selain bentuk manfaat barang dan komoditas, program pelayanan sosial dalam panti juga memberikan manfaat dalam bidang kesehatan. Dalam panti, tersedia sarana dan prasarana kesehatan serta adanya tenaga kesehatan profesional. Dengan adanya tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai di dalam panti akan membantu para lansia untuk mengenali kondisi kesehatan mereka. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pemeriksaan dan perawatan dasar seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, serta pemberian vitamin. Disamping itu, para lansia juga akan dapat terhindar atau melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan yang umumnya akan dialami oleh lanjut usia. Bentuk manfaat selanjutnya yang diperoleh oleh lansia adalah perawatan fisik. Pelayanan yang diselenggarakan oleh panti salah satunya adalah pembinaan fisik melalui senam dan jalan sehat. Dengan demikian, lanjut usia yang masih bisa bergerak dapat merasakan manfaat kesehatan dari kegiatan senam dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh panti.

Adapun bentuk layanan yang diterima oleh penerima program pelayanan sosial dalam panti adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan, yakni pelayanan yang ditawarkan oleh panti untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga binaan sosial lansia supaya mereka mampu menyadari sedini mungkin dan melakukan pencegahan dari serangan penyakit yang dapat menyerang lansia serta memberikan perawatan dan penyembuhan bagi lansia yang memiliki penyakit.
- 2) Pelayanan mental, yakni pemberian konseling bagi lansia yang mengalami atau memiliki permasalahan psikis. Dalam pemberian konseling ini dilakukan oleh psikolog yang profesional di bidangnya. Setiap lansia yang memiliki masalah psikologis seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya akan mendapatkan layanan konseling dari psikolog untuk mencari alternatif pemecahan masalah dari masalah yang ada.
- 3) Pelayanan kerohanian, yaitu pemberian bimbingan spiritual kepada lansia agar lebih memiliki hubungan yang intim dengan sang pencipta. Pelayanan kerohanian ini dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing setiap warga binaan lansia.
- 4) Pelayanan bimbingan sosial, yakni pelayanan yang ditujukan untuk membangun hubungan sosial para penerima layanan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan bimbingan sosial tersebut adalah kegiatan rekreasi, kegiatan kesenian, serta kegiatan keterampilan (Sulistyo, 2008; Departemen Sosial RI, 2005).

Pelayanan-pelayanan tersebut dilaksanakan rutin setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panti. Bentuk manfaat dan layanan ini diterima dan diikuti oleh seluruh warga binaan sosial panti werdha Budi Mulia 3.

Aturan Kelayakan (*Eligibility Rules*)

Aturan/standar kelayakan merupakan bagian yang paling penting di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Standar kelayakan bertujuan untuk memberikan batasan-batasan serta kategori-kategori tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan program atau kebijakan tersebut. Aturan kelayakan bertujuan untuk membagi kelompok menjadi dua yakni



kelompok yang layak menerima layanan atau program dan kelompok yang tidak layak menerima layanan atau program. Aturan kelayakan atau standar kelayakan ada karena suatu program tidak ditujukan kepada seluruh atau semua penduduk. Hal ini dikarenakan setiap kelompok penduduk memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, supaya setiap kelompok mendapatkan layanan sesuai kebutuhan-kebutuhannya maka sangat diperlukan aturan kelayakan. Aturan kelayakan yang diterapkan di dalam program pelayanan sosial berbasis panti ini adalah aturan administratif. Aturan administratif dibuat untuk memperjelas isi dari program posyandu yang akan dilaksanakan terhadap masyarakat lanjut usia. Aturan administratif mengidentifikasi begitu banyak topik yang berbeda tentang kondisi calon penerima manfaat. Aturan administratif ini bertujuan untuk membantu lansia agar tidak terjadinya diskriminasi hak serta diskriminasi partisipatif.

Adapun aturan yang diselenggarakan oleh panti sosial Budi Mulia 3 Jakarta Selatan untuk menentukan penerima manfaat dari program pelayanan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Warga Binaan Sosial (WBS) harus penduduk warga yang berasal atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Hal ini bertujuan agar mengurangi angka kemiskinan dan ketelantaran di Indonesia khususnya di DKI Jakarta yang sebagian besar terdapat gelandangan serta pengemis yang sudah lanjut usia.
- 2) Persyaratan usia atau umur 60 tahun, berdasarkan Undang-Undang No. 13/1998 tentang Lanjut Usia yang menjelaskan bahwa karakteristik dari lanjut usia yaitu berusia 60 tahun keatas. Sehingga persyaratan masuk dan tinggal di panti werdha Budi Mulia 3 individu tersebut sudah berusia 60 tahun keatas
- 3) Tidak adanya keluarga maupun tidak dirawat oleh keluarga sehingga mengalami keterlantaran serta hidup sebatang karang dan tidak mempunyai siapapun. Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 3, agar sasaran pelayanan atau penerima pelayanan tepat sasaran maka dalam melakukan penerimaan kepada calon warga binaan sosial yaitu Lanjut Usia yang terlantar tidak mempunyai keluarga (anak, saudara maupun ditinggal meninggal suami maupun istri) atau tidak mendapatkan perawatan atau pengakuan dari anak, saudara maupun suami.
- 4) Surat keterangan ketidakmampuan dari kelurahan
- 5) Memiliki kesehatan yang baik secara jasmani dan rohani.
- 6) Memiliki kemandirian.
- 7) Harus siap untuk mentaati setiap aturan yang berlaku di panti (Komnas Lansia, 2010)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa sebagian besar warga binaan lanjut usia di panti werdha Budi Mulia 3 adalah lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga dan hidup sebatang karang. Sedangkan, lansia yang mengalami keterlantara lainnya adalah lansia yang masih memiliki keluarga namun sudah mengalami kehilangan kontak. Secara umum, kriteria tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa lansia yang berasal dari luar DKI Jakarta dan karena kondisi lansia yang terlantar dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mengharuskan panti untuk menerima lansia tersebut menjadi warga binaan sosial. Aturan penerima pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti Budi Mulia 3 pada pelaksanaannya tidak memiliki hambatan atau kendala. Setiap warga binaan sosial yang menerima pelayanan sosial sudah disesuaikan dengan keadaan mereka yang mengharuskan mereka mendapatkan pelayanan tersebut. Sehingga, bagi para lansia yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga dan hidup sebatang karang dapat mengakses program pelayanan sosial tersebut dengan tinggal di panti.

Administrasi dan Pengiriman Layanan (*Administration and Service Delivery*)

Program pelayanan sosial berbasis panti merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian sosial untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada kelompok usia lanjut yang hidup

terlantar. Program ini terbentuk sebagai upaya pemerintah untuk merespon permasalahan kelompok lanjut usia yang mengalami keterlantaran. Dalam pelaksanaan program pelayanan sosial berbasis panti ini dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak lain. Adapun pihak terkait atau jaringan kerjasama yang sudah terjalin dengan program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti sosial Budi Mulia 3 adalah:

- 1) Pemerintah Pusat yakni bekerja sama dengan Kementerian Sosial dengan melakukan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam pelayanan lanjut usia yang berkaitan dengan bimbingan, kegiatan dan program sosial lanjut usia. Selain itu dengan Kementerian Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan kegiatan bakti sosial untuk mengobati katarak.
- 2) Pemerintah Daerah yakni bekerja sama dengan Puskesmas kelurahan Gandaria Selatan, Puskesmas Kecamatan Cilandak, RSUD Pasar Minggu, RSUD Duren Sawit, juga Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- 3) Masyarakat yakni bekerjasama dengan masyarakat yaitu pesantren Aisyah dan PB Sudirman untuk agama Islam, Yayasan Lima Roti Dua Ikan untuk agama Kristen, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Vihara Mahavira Graha Pusat, Inni Ceragem (Laporan Kegiatan PSTW BM 3, 2023).

Program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti werdha Budi Mulia 3 dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan-tahapan yakni:

- 1) Pendekatan awal, yakni tahap awal dalam proses pelayanan sosial di panti sosial Budi Mulia 3 Jakarta Selatan yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari calon warga binaan sosial serta memperoleh data awal tentang calon WBS tersebut.
- 2) Penerimaan, yaitu tahapan dimana lansia yang merupakan calon penerima layanan sosial di panti telah memenuhi kriteria atau peraturan untuk dapat diterima menjadi WBS di panti. Selanjutnya, hasil dari data awal akan berguna untuk menempatkan lansia sesuai dengan kondisinya baik secara jasmani maupun mental.
- 3) Asesmen, yakni melakukan penggalan informasi untuk mengungkap permasalahan yang dimiliki oleh para warga binaan sosial lansia serta memahami apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh WBS. Disamping menggali masalah yang ada, pada tahap ini juga dilakukan penggalan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan lanjut usia untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam memecahkan masalah lansia itu sendiri.
- 4) Pembinaan, yaitu melaksanakan pemecahan masalah serta kegiatan-kegiatan bimbingan yang sudah dibuat untuk peningkatan kesejahteraan lansia di dalam panti.
- 5) Resosialisasi, yaitu tahap memberikan proses bimbingan yang membantu lansia untuk dapat mempersiapkan dirinya supaya bisa diterima kembali lagi ke dalam lingkungan keluarga serta masyarakat.
- 6) Penyaluran, yaitu proses lanjut usia dikembalikan ke lingkungan keluarga maupun mengirimkan lansia ke tempat lain dikarenakan suatu hal tertentu.
- 7) Terminasi, yaitu pengakhiran pelayanan terhadap warga binaan lansia yang sudah tidak lagi berada di panti. Terminasi ini dilakukan oleh sebab lanjut usia berhasil dikembalikan atau dipulangkan kembali kekeluarganya dan/atau lansia yang sudah meninggal (Wibawa, 2015).

Pelaksanaan pelayanan sosial di Panti Werdha Budi Mulia 3 sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pelayanan sosial tersebut adalah ketidakterbukaan lanjut usia pada asesmen yang menyebabkan penggalan informasi terhadap lansia tidak berjalan baik dan tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan.



Pembiayaan (*Financing*)

Pelaksanaan program pelayanan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 3 tidak terlepas dari pembiayaan dan anggaran Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Margaguna termasuk lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya lanjut usia yang tidak mampu, kurang beruntung atau sering disebut dengan lanjut usia terlantar. Oleh sebab itu dalam pemenuhan kebutuhan para Warga Binaan Sosial atau (WBS), Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 3 Margaguna mendapatkan anggaran dana hanya merupakan dari pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pembentukan merupakan dari pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 3 Margagna Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil temuan, anggaran dana untuk pelaksanaan program pelayanan sosial saat ini sudah cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni dalam pemenuhan kebutuhan hidup warga binaan sosial lanjut usia. Hal ini didukung pula dengan pengelolaan keuangan yang baik oleh panti sehingga mendukung penuh setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mencukupi untuk membantu memenuhi keperluan warga binaan lanjut usia.

Interaksi (*Interactions*)

Program pelayanan sosial ini memiliki keterkaitan dengan program-program lainnya seperti program posyandu lansia. Posyandu lansia merupakan program yang didirikan untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh para lansia, khususnya di bidang kesehatan. Menurut Wulansari (2015), pos layanan terpadu (Posyandu) lanjut usia merupakan suatu program pelayanan kesehatan masyarakat khusus untuk lansia, agar dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mendasar tanpa mempedulikan biaya. Demikian pula, Menap, Maryam & Sastrawan (2021) menyampaikan bahwa Posyandu lansia merupakan wadah kerjasama lintas disiplin dan masyarakat yang didukung oleh Puskesmas sebagai pemberi dukungan dan bimbingan teknis. Sehingga, program posyandu lansia merupakan program yang memberikan bantuan kepada lanjut usia dalam aspek kesehatan mereka.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti Budi Mulia 3 dapat bekerjasama dengan posyandu lansia yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Keterkaitan antara program pelayanan sosial lansia dalam panti dengan program posyandu lansia adalah saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat bagaimana posyandu lansia dapat membantu pemenuhan pelayanan kesehatan di panti lanjut usia dan begitu juga sebaliknya program pelayanan sosial dapat membantu posyandu lansia untuk melaksanakan bimbingan sosial pada saat pelaksanaan posyandu. Sebagaimana didalam program posyandu juga menawarkan layanan olahraga dan aktivitas fisik selain layanan kesehatan, termasuk senam lansia, yang dilakukan sebulan sekali sebagai bagian dari kegiatan Posyandu Lansia. Untuk menilai kesehatan mental, emosional, dan fisik lansia, layanan sosial dan konseling juga tersedia (Komnas Lansia, 2010). Sehingga, tenaga profesional di panti dapat membantu pelaksanaan pelayanan di program posyandu dan sebaliknya tenaga profesional di posyandu dapat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di panti.

SIMPULAN

Pada waktu ini, tingkat pertumbuhan lanjut usia semakin berkembang termasuk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk lanjut usia yang semakin meningkat ini didukung oleh peningkatan derajat kesehatan. Namun, pertumbuhan penduduk juga tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang akan dihadapi oleh lanjut usia baik di bidang kesehatan, psikologis, maupun sosialnya. Disamping itu, permasalahan yang dihadapi oleh kelompok lanjut usia adalah penelantaran yang dilakukan oleh



keluarganya sendiri oleh akibat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri lanjut usia. Akibatnya, tidak sedikit lansia yang mengalami keterlantaran dan tidak tahu tinggal dimana dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini banyak menyelenggarakan program atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan lanjut usia dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi lanjut usia terlantar. Program pelayanan sosial berbasis panti merupakan salah satu kebijakan yang diimplementasikan menjadi program untuk membantu lanjut usia terlantar.

Berdasarkan hasil dari analisa program posyandu lansia menggunakan metode Chambers dapat disimpulkan bahwa program pelayanan sosial lansia berbasis panti dibentuk untuk memberikan pelayanan fisik, pelayanan psikologis, pelayanan spiritual, dan layanan lainnya kepada para lanjut usia yang terlantar. Melalui program ini ada banyak manfaat yang dapat diterima oleh para lanjut usia terlantar baik dalam kesehatan, tempat tinggal, sosial, pemenuhan kebutuhan maupun lainnya. Dalam program pelayanan sosial lansia dalam panti tersebut juga tidak mengandung persyaratan-persyaratan yang menyusahakan para lanjut usia terlantar untuk mengaksesnya. Sebaliknya program ini sangat membantu para lansia untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan dari pemerintah secara gratis tanpa memungut biaya 1 rupiah pun. Sehingga, tentunya ini akan sangat membantu lansia dalam mendapatkan perlindungan dan perawatan di masa tua-nya. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan mulai dari pengetahuan lansia yang sangat rendah terhadap program pelayanan sosial yang diberikan, sarana dan prasarana yang juga masih kurang memadai, dan ketidakterbukaan lansia dalam memberikan informasi pada saat pelayanan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A., Puspitasari, N., & Nur, D. U. (2020). Aktivitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pada Lansia Physical Activity To Quality Of Life In The Elderly. In *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad: Vol. XIII* (Issue 2).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Chambers, D., & Bonk, J. F. (2013). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst* (Sixth Edit). United States: Pearson Education, Inc.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Pedoman umum pelaksanaan subsidi silang pada panti sosial tresna werdha (PSTW)*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- Duha, J. K. J. V., Kuswanda, D. ., & Winarni, E. D. . (2023). Efektivitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung: Efektivitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Pondok Lansia Tulus Kasih Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 22(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.402>
- Hawari, Dadang. (1997). *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dharma Bakti Primayasa.
- Kodaruddin, W. N., Sulastri, S., & Wibowo, H. (2020). Penerapan Aspek Keberfungsian Sosial Levin Sebagai Instrumen Asesmen di Panti Lansia Bojongsata Pemalang. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 6(2), 236–252. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12981>
- Komisi Nasional Lanjut Usia. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia*. Jakarta: hal.1-78
- Kusumawardani, D., & Andanawarih, P. (2018). Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesehatan Lansia Di Perumahan Bina Griya Indah Kota Pekalongan. *Siklus : Journal Research Midwifery Politeknik Tegal*, 7(1). <https://doi.org/10.30591/siklus.v7i1.748>
- Maryatun, Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlupelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)(Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi

- Utomo Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2).
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Menap, M., Maryam, B., & Sastrawan, S. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Lanjut Usia di Sentra Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, 9(1). <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v9i1.4291>
- Nirmala, S. D. (2013). *Pengertian Lanjut usia - E-JURNAL*. <https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-lanjut-usia.html>
- Nurwahyuliningsih, E., Nulhaqim, S. A., & Rachim, H. A. (2022). Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2).
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5310>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Osman, A., Jane, L., Courtney. 2012. The depression anxiety stress scales-21 DASS-21: *further examination of dimentions, skill reliability, and correlates*. *Journal Of Clinical Psikologi*, 68 12. Diakses di online library. *Wiley.com*
- Rahmayani, D., Wijaksono, M. A., & Putri, R. R. (2016). Hubungan Tingkat Stres Dan Gaya Hidup Dengan Kualitas Tidur Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Wherda (Pstw) Budi Sejahtera Banjarbaru. *Hubungan Tingkat Stres...*, 7(1).
- Rammohan, A., & Magnani, E. (2012). *Modelling the influence of caring for the elderly on migration: Estimates and evidence from Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(3).
<https://doi.org/10.1080/00074918.2012.728652>
- Rusmiyati, C. (2020). Kebutuhan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(2).
- Şahin, E., Topkaya, N., Gençoğlu, C., & Ersanlı, E. (2018). *Prevalence and correlates of hopelessness among turkish elderly people living with family or in nursing homes*. *Societies*, 8(2).
<https://doi.org/10.3390/soc8020039>
- Saputri, Y. H., & Prasetyo, Y. B. (2012). *Peran Sosial Dan Konsep Diri Pada Lansia Social Character and Self Concept In Old Year Age*. 256–263.
- Sukmana, D., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Pelayanan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada Yayasan Biruku Indonesia). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1) <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5814>
- Sulastri, S., & Humaedi, S. (2017). Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14225>
- Sulistyo, Sumar. (2008). Pengaruh Pelaynan Panti Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia. Yogyakarta: B2P3KS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Wibawa, Budhi, dkk. 2015. Pengantar Pekerjaan Sosial. Sumedang: Unpad Press.
- World Health Organization. 2016. *Definition Of An Older Or Elderly Person*. Diakses tanggal 03 April 2023 di unduh dari <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/>
- Wulansari, T. (2015). Studi Deskriptif Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia di RW IV Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).